

ABSTRAK

Permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa konvensional dikarenakan adanya kasus penyalahan prosedur terkait proses pengadaan, adanya ketidak transparan dalam proses pengumuman lelang yang seringkali terjadi, syarat-syarat maupun spesifikasi dokumen pengadaan yang diarahkan kepada pihak tertentu, ketidak fokusannya panitia pada proses pelaksanaan tugas, serta masih ditemukan masalah yaitu ditemukannya intervensi terhadap panitia Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) diterapkan untuk menghindari peluang-peluang terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan dengan sistem pengadaan konvensional. Peluang kontak langsung antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa dapat diminimalisir melalui pengadaan secara elektronik, hingga dalam prosesnya mampu menghemat biaya dan hemat waktu, berlangsung secara transparan, serta mampu dipertanggungjawabkan. Pemerintah Kota Bandung sudah menjalankan kebijakan *e-procurement* tersebut dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Secara teoritik, pengadaan barang/jasa secara elektronik ini memang lebih banyak keuntungan yang diperoleh dibanding dengan pengadaan barang/jasa secara manual. Akan tetapi, dalam teknis pelaksanaannya ternyata masih terdapat beberapa permasalahan.

Maksud dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pengadaan pada bagian pengadaan barang dan jasa secara Elektronik di Kota Bandung. Menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan metode deskriptif, adapun teori yang digunakan adalah teori dari Jones (1994) yang memfokuskan pada Input, Proses, serta Output.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Input pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana serta SDM yang tersedia sudah memadai, hal ini disebutkan oleh ketiga informan walaupun dalam jawabannya terdapat kesamaan serta perbedaan, mereka menilai bahwa Sarana dan Prasarana untuk sekarang sudah cukup namun perlu digaris bawahi bahwa harus diseimbangi dengan SDM yang sesuai dan juga bisa mengoptimalkan kinerja LPSE itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis proses dalam pengadaan barang dan jasa Kota Bandung dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan sosialisasi *e-procurement* untuk memberikan sosialisasi kepada beberapa organisasi terkait dan masyarakat sebagai objek dari tujuan kerja pemerintah di lingkungan Kota Bandung bahwa pada proses output yang lebih ditekankan oleh para Informan adalah sistem informasi yang lebih baik serta pelayanan pada pengadaan barang dan jasa lebih baik. Tingkat efisiensi pengadaan barang dan jasa dari pagu RUP pagu HPS. Proses *e-procurement* setahun bisa segitu dari pagu anggaran. Dalam alur mekanisme pengumuman SiRUP Berdasarkan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pengadaan Pasal 18 ayat 2 nomor 83.

Kata Kunci : LPSE, Pengadaan Barang dan Jasa, Teori Efektivitas, Input, Proses, Output, Kota Bandung

ABSTRACT

Problems in the conventional goods/services procurement process are due to cases of misrepresentation of procedures related to the procurement process, non-transparency in the tender announcement process which often occurs, the requirements and specifications for procurement documents directed at certain parties, the committee's lack of focus on the task implementation process, and problems were still found, namely the discovery of interventions against the committee for the implementation of electronic procurement of goods and services (e-procurement) to avoid opportunities for fraud or abuse with the conventional procurement system. Opportunities for direct contact between the procurement committee and goods/services providers can be minimized through electronic procurement, so that the process is able to save costs and save time, take place transparently, and can be accounted for. The Bandung City Government has implemented the e-procurement policy on the legal basis of Presidential Regulation Number 12 of 2021. Theoretically, electronic procurement of goods/services indeed has more advantages compared to manual procurement of goods/services. However, in the technical implementation there are still some problems.

The purpose of this research is to analyze and describe the procurement process in the electronic procurement of goods and services in the city of Bandung. Using a qualitative approach with descriptive methods, while the theory used is the theory of Jones (1994) which focuses on Input, Process, and Output.

Based on the results of interviews regarding Input in the procurement of goods and services electronically, it can be concluded that the facilities and infrastructure and available human resources are sufficient, this was mentioned by the three informants, although in their answers there were similarities and differences, they considered that the facilities and infrastructure for now were sufficient. but it needs to be underlined that it must be balanced with appropriate human resources and can also optimize the performance of the LPSE itself. Based on the results of the process analysis in the procurement of goods and services in Bandung City, it can be concluded that in providing e-procurement socialization to provide socialization to several related organizations and the community as the object of the government's work goals in the Bandung City environment, that the output process that was emphasized more by the informants was better information systems and better services in the procurement of goods and services. Efficiency level of procurement of goods and services from the RUP ceiling to the HPS ceiling. The e-procurement process for a year can be that much from the budget ceiling. In the flow of the mechanism for announcing the SiRUP Based on Presidential Regulation

Keywords: *LPSE, Procurement of Goods and Services, Theory of Effectiveness, Input, Process, Output, Bandung City*